

KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN KENAIKAN TARIF PARKIR DI KOTA BANJARMASIN

Arif Rahman Hakim¹⁾, Ajwa Syabina Aulia²⁾

¹²⁾Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kepuasan masyarakat terhadap kebijakan kenaikan tarif parkir kendaraan roda dua dan roda empat di Kota Banjarmasin. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan penyebaran kuisioner kepada 109 responden yang dipilih secara acak. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan kenaikan tarif parkir dinilai kurang efektif. Mayoritas responden menyatakan ketidakpuasan yang dipengaruhi oleh keberadaan parkir liar, fasilitas dan pelayanan yang belum memadai, serta keraguan terhadap kontribusi kebijakan ini terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Faktor utama yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam menggunakan lahan parkir meliputi lokasi, perbedaan tarif, dan waktu penggunaan. Temuan ini menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh atas implementasi kebijakan serta kajian lanjutan untuk merumuskan strategi pengelolaan parkir yang lebih adil, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.

Kata Kunci: Kepuasan Masyarakat, Tarif Parkir, Efektivitas Kebijakan, Banjarmasin

Abstract

This study aims to analyze public satisfaction with the policy of increasing parking fees for two- and four-wheeled vehicles in Banjarmasin City. A descriptive quantitative method was applied by distributing questionnaires to 109 randomly selected respondents. The findings indicate that the policy is considered expressed dissatisfaction due to the persistence of illegal parking. Inadequate facilities and services, and doubts about the policy's contribution to increasing local revenue (PAD). The main factors influencing parking choices include location, fee differences, and usage time. These results highlight the need for a comprehensive evaluation of policy implementation and further studies to formulate parking management strategies that are fair, transparent, and beneficial for both the community and local government.

Keywords: Public Satisfaction, Parking Fee, Policy Effectiveness, Banjarmasin

PENDAHULUAN

Peningkatan mobilitas masyarakat yang sangat pesat serta urbanisasi yang terus berkembang di Kota Banjarmasin membawa dampak signifikan terhadap pengelolaan lalu lintas dan fasilitas

parkir. Kota Banjarmasin, sebagai mantan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki peran yang sangat penting sebagai pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan di wilayah Kalimantan. Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Banjarmasin mengalami peningkatan jumlah kendaraan bermotor, baik kendaraan roda dua maupun roda empat, yang cukup signifikan. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, jumlah kendaraan roda dua dan roda empat mengalami peningkatan lebih dari 5% setiap tahunnya selama dekade terakhir (Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, 2023). Hal ini menyebabkan tingginya kebutuhan akan fasilitas parkir yang memadai di berbagai wilayah kota, yang pada akhirnya berkontribusi pada meningkatnya kemacetan lalu lintas khususnya di pusat kota.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, keterbatasan lahan parkir menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk kemacetan lalu lintas di daerah-daerah yang padat aktivitas. Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan pribadi, penggunaan lahan parkir yang terbatas semakin mengganggu kelancaran arus lalu lintas, yang berdampak negatif pada kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Permasalahan ini semakin kompleks mengingat kondisi geografis Kota Banjarmasin yang sebagian besar merupakan daerah rendah dan berada di sepanjang aliran sungai, yang mengakibatkan ruang untuk pembangunan fasilitas baru, termasuk tempat parkir, sangat terbatas. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan kebijakan yang tepat untuk mengatur penggunaan lahan parkir yang ada agar lebih efisien.

Pemerintah Kota Banjarmasin kemudian mengambil langkah untuk mengatasi permasalahan ini dengan menerapkan kebijakan kenaikan tarif parkir bagi kendaraan roda dua dan roda empat. Kebijakan kenaikan tarif parkir ini diberlakukan mulai tanggal 1

April 2024, dengan tarif parkir kendaraan roda dua yang sebelumnya sebesar Rp2.000 dinaikan menjadi Rp3.000, sementara untuk kendaraan roda empat, tarif parkir yang semula Rp3.000 menjadi Rp5.000. kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penataan dan Pengendalian Parkir yang mencakup penetapan tarif parkir, perizinan, sanksi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

Kenaikan tarif parkir ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kemacetan, tetapi juga sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan laporan dari Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, PAD dari sektor parkir belum mencapai target yang diinginkan, dan kebijakan kenaikan tarif parkir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan PAD. Dalam beberapa tahun terakhir, PAD yang berasal dari sektor parkir hanya mencapai 86% dari target yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan penyesuaian tarif untuk memenuhi target tersebut. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan parkir yang selama ini dinilai belum memadai. Sebaagai contoh, pengelolaan parkir yang kurang baik dan keberadaan parkir liar yang merugikan masyarakat menjadi alasan pentingnya dilakukan kebijakan penyesuaian tarif parkir ini.

Kebijakan kenaikan tarif parkir ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan lahan parkir yang terbatas di Kota Banjarmasin, mengurangi kebiasaan parkir sembarangan, serta mendorong masyarakat untuk beralih ke moda transportasi alternatif seperti transportasi umum atau berbagi kendaraan. Namun, meskipun kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, seperti potensi penolakan dari masyarakat yang

merasa terbebani dengan kenaikan tarif parkir tersebut. Selain itu, keberadaan oknum parkir liar yang memanfaatkan kebijakan ini untuk keuntungan pribadi juga menjadi salah satu masalah yang harus diatasi. Oleh karena itu, untuk menilai efektivitas kebijakan ini, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan kenaikan tarif parkir ini, serta dampaknya terhadap pola perilaku pengguna kendaraan di Kota Banjarmasin.

Pentingnya penelitian ini terletak pada fakta bahwa meskipun kebijakan kenaikan tarif parkir ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengatasi kemacetan, dampak dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat, pengelolaan parkir, serta kualitas layanan parkir perlu dievaluasi secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan kenaikan tarif parkir yang telah diterapkan di Kota Banjarmasin, serta untuk menganalisis efektivitas kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemerintah kota. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah Kota Banjarmasin dalam merumuskan kebijakan parkir yang lebih efektif dan efisien di masa depan.

Pada kaidahnya penelitian tentang kebijakan parkir sebagai bagian dari ilmu pemerintahan membantu mengidentifikasi efektifitas kebijakan publik yang diterapkan di ruang publik. Sebagai contoh, kebijakan kenaikan tarif parkir yang diterapkan di Kota Banjarmasin bertujuan untuk mengatur pemanfaatan ruang terbatas di pusat kota serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Musanef (1985) menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan berkaitan dengan hubungan antar instansi pemerintahan serta masyarakat yang menjadi objek kebijakan, sehingga efektivitas kebijakan publik di sektor transportasi dapat dianalisis menggunakan pendekatan ilmu pemerintahan yang

menyeluruh.

Terkait kebijakan kenaikan tarif parkir, penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Mifta Melinda (2021) dan Laily Rizki Amalia (2023) mengkaji penerapan tarif parkir pada berbagai daerah. Mifta (2021) meneliti kenaikan tarif parkir di Taman Kota Metro Pusat, yang menunjukkan bahwa tarif yang ditetapkan pemerintah sering kali tidak diikuti dengan peningkatan pelayanan atau fasilitas yang setara. Sebagai perbandingan, penelitian Laily Rizki Amalia (2023) di Pekanbaru mengungkapkan bahwa meskipun tarif parkir dinaikkan, pengelolaan parkir yang buruk, seperti penggunaan atribut juru parkir yang tidak lengkap dan pengawasan yang minim, justru memperburuk efektivitas kebijakan.

Dalam konteks Kota Banjarmasin, peneliti menggunakan teori Perubahan Kebijakan Publik (Public Policy Change Theory) yang dikemukakan oleh Paul Sabatier dan Hank Jenkins-Smith (1988). Teori ini menekankan bahwa perubahan kebijakan publik adalah hasil dari interaksi antara berbagai aktor yang memiliki kepentingan, serta pengaruh faktor eksternal seperti sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi keputusan kebijakan. Dalam hal ini, kebijakan kenaikan tarif parkir diharapkan dapat meningkatkan PAD dan mengatur penggunaan ruang parkir dengan lebih efisien. Namun, sebagaimana yang ditunjukkan oleh penelitian Hidayat & Setyawan (2022), tantangan implementasi kebijakan sering kali datang dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kenaikan tarif tanpa adanya perubahan signifikan dalam kualitas layanan.

Penelitian ini juga merujuk pada teori evaluasi kebijakan yang mengintegrasikan persepsi masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya dipandang dari segi administratif tetapi juga

dampaknya terhadap masyarakat sebagai pengguna langsung. Evaluasi kebijakan menggunakan survei kepuasan masyarakat, sebagaimana yang dilakukan oleh Harminto & Putranto (2023), memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul setelah implementasi kebijakan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif yang berfokus pada pengukuran objektif dan analisis numerik terhadap data yang dikumpulkan. Pendekatan kuantitatif dipilih karena dapat memberikan gambaran yang terukur mengenai persepsi masyarakat terhadap kebijakan kenaikan tarif parkir roda dua dan roda empat di Kota Banjarmasin, serta tingkat kepatuhan mereka terhadap kebijakan tersebut. Data yang dikumpulkan melalui survei atau kuesioner akan dianalisis dengan menggunakan teknik statistik untuk memperoleh kesimpulan yang objektif dan terstruktur.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banjarmasin, dengan fokus pada pengguna kendaraan roda dua dan roda empat yang terdaftar di Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada permasalahan yang muncul terkait dengan implementasi kebijakan kenaikan tarif parkir yang tidak merata di seluruh wilayah kota.

Populasi penelitian terdiri dari seluruh pengguna kendaraan roda dua dan roda empat yang terdaftar dalam sistem retribusi harian parkir di Kota Banjarmasin, yang berjumlah sekitar 14.886 kendaraan. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik random sampling, dengan margin of error 10% untuk memastikan representasi yang adil dari berbagai lapisan masyarakat.

Berdasarkan rumus Slovin, ukuran sampel yang diperlukan adalah sebanyak 100 responden.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama: observasi langsung dan distribusi kuesioner. Observasi dilakukan di lokasi-lokasi parkir umum untuk menilai interaksi antara pengguna dan juru parkir serta pengelolaan administrasi parkir. Kuesioner disebarakan secara online melalui Google Form kepada masyarakat pengguna kendaraan roda dua dan roda empat di Kota Banjarmasin. Kuesioner ini dirancang dengan menggunakan skala Likert untuk mengukur tingkat kepuasan dan persepsi terhadap kebijakan kenaikan tarif parkir.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik dasar dari sampel penelitian. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk memastikan keakuratan dan konsistensi instrumen penelitian. Selanjutnya, uji korelasi Pearson digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel-variabel yang ada, seperti pengaruh kebijakan terhadap kepatuhan masyarakat. Uji signifikansi juga diterapkan untuk menentukan apakah temuan yang diperoleh dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan kenaikan tarif parkir roda dua dan roda empat di Kota Banjarmasin. Data penelitian diperoleh dari kuesioner yang disebarakan kepada 109 responden yang merupakan pengguna kendaraan roda dua dan roda empat. Kuesioner terdiri dari 11 pertanyaan yang terbagi dalam tiga kategori utama: kebijakan kenaikan tarif parkir, dampak kebijakan terhadap masyarakat, dan pengaruh waktu serta tempat terhadap keputusan penggunaan parkir.

Dari hasil pengumpulan data, sebagian besar responden menyatakan ketidakpuasan terhadap kebijakan kenaikan tarif parkir yang diterapkan. Secara rinci, 61% responden tidak setuju dengan kenaikan tarif tersebut dan menganggap tarif yang diberlakukan tidak sebanding dengan fasilitas dan kualitas layanan parkir yang ada. Selain itu, 93% responden mengungkapkan bahwa lokasi parkir berpengaruh besar terhadap keputusan mereka untuk memarkirkan kendaraan. Hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas lahan parkir dan lokasi strategis memiliki dampak signifikan terhadap kenyamanan pengguna dalam memanfaatkan fasilitas parkir.

Dalam hal pengaruh waktu terhadap penggunaan parkir, hasil penelitian menunjukkan bahwa 72% responden mengaku memilih lokasi parkir yang berbeda pada hari kerja dan akhir pekan. Pengaruh waktu ini mengindikasikan bahwa perilaku masyarakat dalam menggunakan fasilitas parkir dipengaruhi oleh faktor kebutuhan serta situasi tertentu yang terjadi di lapangan. Masyarakat lebih memilih lokasi parkir yang memiliki harga lebih murah atau lebih dekat dengan tujuan, terutama pada hari kerja atau hari-hari sibuk lainnya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alfi, Atik & Siti (2023) mengatakan bahwa hambatan pada dimensi disposisi berpacu pada aspek pengetahuan khususnya responsivitas pada pembaharuan kebijakan yakni pada cara penyampaian pihak pemerintah mengenai edukasi responsivitas kebijakan tersebut.

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item dalam kuesioner memiliki tingkat validitas yang tinggi, dimana nilai korelasi antara setiap item dengan total skor lebih besar dari nilai r tabel. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa instrumen kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini valid dan dapat diandalkan untuk mengukur persepsi masyarakat terkait

kebijakan kenaikan tarif parkir. Selain itu, hasil uji reliabilitas juga menunjukkan bahwa seluruh item dalam kuesioner memiliki tingkat konsistensi internal yang baik, dengan nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,7, yang menandakan bahwa instrumen yang digunakan stabil dan dapat menghasilkan hasil yang konsisten.

Ditemukan bahwa kebijakan kenaikan tarif parkir yang diterapkan di Kota Banjarmasin tidak sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuannya, yakni untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan mengoptimalkan penggunaan fasilitas parkir. Masyarakat yang diwawancarai mayoritas menganggap bahwa kenaikan tarif parkir ini tidak sebanding dengan peningkatan kualitas fasilitas parkir yang diberikan. Hanya sebagian kecil responden yang merasa bahwa kenaikan tarif parkir dapat membawa dampak positif terhadap PAD dan kemajuan infrastruktur parkir.

Salah satu masalah utama yang ditemukan adalah ketidakseimbangan antara kenaikan tarif dan kualitas layanan parkir. Meskipun tarif parkir meningkat, pengelola fasilitas parkir dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut masih sangat kurang. Banyak responden yang mengungkapkan ketidakpuasan terhadap kondisi fisik area parkir yang masih terbatas dan fasilitas yang kurang memadai, seperti tidak adanya sistem informasi yang memadai, kurangnya penegakan hukum terhadap parkir liar, serta masih banyaknya petugas parkir yang tidak profesional. Hal ini menyebabkan kebijakan kenaikan tarif parkir tidak dapat mengurangi kemacetan yang terjadi di pusat kota, malah menambah beban masyarakat karena mereka harus membayar lebih untuk fasilitas yang tidak sebanding.

Dari segi pengaruh waktu terhadap keputusan parkir, temuan

penelitian menunjukkan bahwa waktu tertentu, seperti hari kerja dan akhir pekan, sangat mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih lokasi parkir. Pada hari kerja, banyak responden yang memilih untuk memarkirkan kendaraan di lokasi dengan tarif parkir lebih murah meskipun jaraknya lebih jauh dari tujuan mereka. Di sisi lain, pada akhir pekan atau hari libur, masyarakat cenderung lebih memilih lokasi parkir yang lebih dekat meskipun tarifnya lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif parkir harus mempertimbangkan faktor waktu dan kepadatan di masing-masing lokasi parkir.

Pengaruh Pengaruh lokasi parkir juga sangat jelas terlihat dalam penelitian ini. 93% responden menyatakan bahwa lokasi menjadi faktor utama dalam memilih tempat parkir. Lokasi parkir yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi, seperti pusat perbelanjaan atau area perkantoran, memiliki permintaan yang lebih tinggi, meskipun tarif parkir di lokasi tersebut lebih mahal. Kebijakan kenaikan tarif yang tidak mempertimbangkan faktor-faktor ini berpotensi menciptakan ketidakpuasan masyarakat, terutama di kawasan yang sudah sangat padat dan kekurangan fasilitas parkir.

Dalam hal dampak kebijakan terhadap PAD, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tidak yakin bahwa kenaikan tarif parkir dapat secara signifikan meningkatkan pendapatan daerah. Sebagian besar responden berpendapat bahwa PAD yang diperoleh dari parkir tidak dapat optimal karena banyaknya oknum pengelola parkir yang tidak transparan dalam menyetor pendapatan kepada pemerintah daerah. Selain itu, ketidakpatuhan masyarakat terhadap tarif parkir juga menjadi masalah besar yang perlu ditangani secara lebih serius oleh pemerintah Kota Banjarmasin.

Secara keseluruhan, meskipun kebijakan kenaikan tarif parkir bertujuan untuk meningkatkan PAD dan mengurangi

kemacetan, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan parkir, minimnya kualitas layanan, serta ketidakmerataan dalam penerapan tarif parkir menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas kebijakan ini. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan perbaikan dalam aspek pengelolaan parkir, pengawasan yang lebih ketat, serta peningkatan kualitas fasilitas parkir untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan pemerintah Kota Banjarmasin.

Pengembangan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat serta perubahan sosial-ekonomi sangat diperlukan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa tarif parkir yang diterapkan sebanding dengan kualitas layanan dan fasilitas yang tersedia, serta memperkuat pengawasan agar kebijakan ini dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu mengurangi kemacetan dan meningkatkan PAD. Ke depannya, penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengevaluasi apakah kebijakan kenaikan tarif parkir dapat beradaptasi dengan perubahan pola mobilitas masyarakat dan kebutuhan infrastruktur yang terus berkembang.

KESIMPULAN

Atas penelitian yang telah diuraikan, hasil penelitian tersebut mendapati kesimpulan bahwa kebijakan kenaikan tarif parkir di Kota Banjarmasin memiliki dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mayoritas responden merasa bahwa tarif parkir yang dikenakan terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan kualitas layanan yang ada. Selain itu, pengelolaan parkir yang masih kurang optimal dan pengawasan yang lemah terhadap parkir liar turut memengaruhi efektivitas kebijakan ini.

Kebijakan tarif parkir juga dipengaruhi oleh faktor waktu dan

lokasi, yang menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam memilih tempat parkir. Pada hari kerja dan akhir pekan, masyarakat menunjukkan perilaku berbeda dalam memilih lokasi parkir, yang berhubungan dengan tarif yang dikenakan dan kedekatannya dengan tujuan. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu mempertimbangkan variabel waktu dan tempat secara lebih detail agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan kenaikan tarif parkir di Kota Banjarmasin:

Peningkatan Kualitas Layanan Parkir: Pemerintah Kota Banjarmasin perlu meningkatkan fasilitas dan kualitas layanan parkir, seperti penyediaan tempat parkir yang lebih luas, penambahan rambu-rambu dan marka parkir, serta penyediaan fasilitas pendukung lainnya. Hal ini akan membantu menciptakan kenyamanan bagi pengguna parkir dan membuat tarif yang dikenakan terasa lebih sebanding dengan layanan yang diberikan.

Pengawasan yang Lebih Ketat: Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tarif parkir perlu diperkuat. Pemerintah harus memastikan bahwa tarif parkir yang ditetapkan dipatuhi oleh pengelola parkir dan bahwa pendapatan yang dihasilkan disetorkan dengan transparan ke kas daerah.

Penyesuaian Tarif Berdasarkan Lokasi dan Waktu: Tarif parkir sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Penetapan tarif yang lebih fleksibel berdasarkan lokasi dan waktu tertentu dapat memberikan solusi yang lebih adil dan merata bagi masyarakat, terutama untuk kawasan yang memiliki tingkat kepadatan kendaraan tinggi.

Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat: Penting bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai kebijakan kenaikan tarif parkir, termasuk alasan dibalik kebijakan ini dan manfaat yang diharapkan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2023). *Banyak dikeluhkan warga, Dishub Banjarmasin awasi tarif parkir Pasar Sudimampir*. Amnesia.
- Algadri, H., Manan, A., & Fatimah, S. (2023). Analisis efektivitas pajak parkir dan retribusi parkir serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kota Mataram tahun 2017–2021. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 3(2), 117–127.
- Amalia, L. R. (2023). Pengaruh kenaikan tarif parkir terhadap kepuasan pengguna jasa parkir di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(3), 221–230.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Asmara, S. P. (2020). Analisis kebijakan peraturan daerah tentang

- kenaikan tarif parkir di DKI Jakarta. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 246–256.
- Creswell, J. W. (2013). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. (2023). *Laporan statistik kenaikan kendaraan roda dua dan roda empat*.
- Hamdani. (2023). *Alasan Dishub naikan tarif parkir untuk mengurangi pengguna ranmor pribadi*. Barito Post.
- Harminto, A., & Putranto, D. (2023). Survei kepuasan masyarakat terhadap implementasi kebijakan publik di daerah perkotaan. *Jurnal Evaluasi Pemerintahan*, 2(2), 101–115.
- Hidayat, R., & Setyawan, B. (2022). Tantangan implementasi kebijakan publik di sektor transportasi perkotaan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(1), 33–48.
- Kosim. (2021). Strategi Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar di Kota Banjarmasin. *Jurnal Sosiatri-Sosiologi FISIP Universitas Mulawarman*, 8(4), 185–199.
- Mifta, M. (2021). Evaluasi penerapan kebijakan kenaikan tarif parkir di Taman Kota Metro. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 56–64.
- Nugraha, A. R., Rochaeni, A., & Munawaroh, S. (n.d.). Implementasi kebijakan ketertiban umum dalam penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. *Caraka Prabu*.
- Rizki, R. D. (2024). *Tarif parkir di Banjarmasin dikeluhkan warga, pengamat: Kebijakan paling tidak efektif*. Radar Banjarmasin.
- Saharuddin, S., & Syarifuddin, S. (2022). Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dengan kualitas pendamping dan kualitas program keluarga harapan dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Makassar. *Jurnal Sosial Sains*, 2(7), 832–842.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syalafuddin, S. (2021). *Analisis pengelolaan parkir upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Banjarmasin* (Tesis, Universitas Islam Kalimantan).